



KEMITRAAN DALAM PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DI INDONESIA

Peserikatan Bangsa Bangsa (PBB) telah menetapkan 17 tujuan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Ke-17 tujuan itu diharapkan dapat tercapai secara global pada tahun 2030 melalui mekanisme kemitraan. Bentuk kemitraan dipilih karena sifatnya yang kolaboratif dengan melibatkan pihak pemerintah, korporasi, LSM dan masyarakat. TPB memainkan peran penting dalam mencapai tujuan kebijakan luar negeri pada berbagai sektor, seperti energi, sumber daya air, stabilitas, dan perdamaian.

BAGAIMANA BENTUK KEMITRAAN YANG DILAKUKAN INDONESIA? dalam mencegah dan memperbaiki kerusakan ekosistem daratan, mengendalikan sampah plastik di laut, mencegah polusi laut akibat dari kegiatan pelayaran, dan mendukung tercapainya TPB secara keseluruhan. Penelitian dilakukan di Provinsi Maluku dan Sulawesi Utara.

Kemitraan Dalam Ekosistem Daratan



Ujung tombak pencapaian TPB adalah Pemerintah Daerah dengan arahan Pemerintah Pusat. Namun, baik Provinsi Maluku maupun Sulawesi Utara, belum mempromosikan kemitraan publik, publik-swasta, dan masyarakat sipil sebagaimana mestinya sehingga pengelolaan sumber daya alam belum menjanjikan adanya keseimbangan antara pembangunan ekonomi, pelibatan masyarakat, dan pemeliharaan ekologi. Kekayaan alam seperti hutan masih dinikmati oleh kalangan tertentu, sementara masyarakat di sekitarnya tidak memperoleh manfaat ekonomi namun terdampak langsung terhadap kerusakan lingkungan. Kerusakan lingkungan di Provinsi Maluku yang paling parah adalah penambangan emas liar di kawasan Gunung Botak, Kabupaten Buru, yang terancam pencemaran merkuri. Sementara kerusakan lingkungan yang disoroti di Provinsi Sulawesi Utara adalah penambangan di kawasan Likupang Timur yang membuang limbah ke kawasan hutan lindung yaitu di hutan Rio.

Kemitraan Dalam Pengendalian Sampah Plastik di Laut

Pemerintah Indonesia telah memiliki Rencana Aksi Nasional (RAN) Penanganan Sampah Laut. Namun mengubah *mindset* pemerintah dan masyarakat di daerah merupakan tantangan sulit. Masyarakat pesisir Maluku masih menganggap laut adalah tempat sampah. Di sisi lain pemda telah mencoba melaksanakan upaya pengendalian sampah plastik di laut, diantaranya dengan cara kegiatan bersih pantai secara berkala dengan melibatkan stakeholders. Namun langkah ini masih terkendala kontinuitas pelaksanaan dan keterbatasan anggaran dan sarana/prasarana di daerah. Secara global, Indonesia merupakan mitra pertama dalam pencaangan Gerakan *Global Plastic Action Partnership* (Kemitraan Aksi Plastik Global) yang terdiri dari kalangan bisnis, kelompok masyarakat sipil dan pemangku kepentingan lokal.



Kemitraan Dalam Pencemaran Laut



Peningkatan kegiatan pelayaran jika tidak diikuti dengan pengelolaan dan pencegahan pencemaran akan mengakibatkan potensi kerusakan lingkungan laut Indonesia akan meningkat dan semakin kompleks. Sekitar 82 persen wilayah terumbu karang di Indonesia terancam rusak, 75% laut Indonesia tergolong sangat tercemar, 20% tercemar sedang, dan 5% dikategorikan tercemar ringan. Pencemaran laut yang kerap terjadi di Indonesia antara lain akibat tumpahan minyak, tabrakan kapal dengan terumbu karang, pembuangan air limbah. Pencemaran laut telah mengakibatkan penurunan hasil tangkapan nelayan di sejumlah kawasan di Indonesia, serta mengganggu sektor pariwisata pesisir dan laut.

Kemitraan Dalam Perdagangan Internasional

Sejak beberapa tahun terakhir, perikanan tangkap mengalami perlambatan pertumbuhan produksi dan cenderung mengalami stagnasi karena jumlah hasil tangkapan yang telah mendekati produksi tangkapan lestari (*maximun sustainable yield/MSY*). Saat ini upaya pengelolaan penangkapan ikan di laut lebih diarahkan pada pengendalian dan penataan faktor produksi untuk menghasilkan pemanfaatan yang berkelanjutan. Selanjutnya, upaya peningkatan produksi perikanan budidaya perlu memperhatikan daya dukung lingkungan, diantaranya terkait kualitas air dan pencemaran yang mungkin terjadi akibat pemberian pakan yang berlebihan, serta pembukaan lahan baru untuk tambak/kolam pemeliharaan ikan. Secara geopolitik Indonesia memiliki peran yang sangat strategis sebagai poros maritim dunia dalam konteks perdagangan global (*the global supply chain system*) yang menghubungkan kawasan Asia-Pasifik dengan Australia.



Fakta yang ditemukan di daerah adalah belum dikembangkannya kemitraan dengan lembaga nonpemerintah maupun swasta dalam rangka ekspor produk perikanan. Jikapun ada, pelaksanaan kemitraan multipihak di Provinsi Sulawesi Utara terkendala koordinasi diantara para pemangku kepentingan sehingga tidak berjalan sesuai harapan.

Kesimpulan

Belum dilaksanakannya RAD menyulitkan para pihak untuk memulai upaya pencapaian TPB. Secara teoritis, kedua provinsi ini belum mencapai tujuan ideal dari sebuah kemitraan. Upaya meningkatkan peran serta aktif masyarakat dalam kegiatan konservasi sumber daya alam bersama pemerintah dalam mewujudkan manusia yang sadar konservasi masih dalam tahapan pembentukan. Indonesia dapat menjalin kerjasama internasional terkait isu-isu di atas, namun hal tersebut tidak akan efektif berdampak secara nasional bila tidak diimbangi perbaikan kondisi di dalam negeri. Harusnya implementasi TPB dilakukan oleh sebuah lembaga yang khusus dalam tingkat nasional.

